

Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Melalui Implementasi Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto

Friska^{*}), Kusdarini^{**}), Roni Ekha Putera^{***})

Program Studi Administrasi Publik Universitas Andalas, 25175, Indonesia

Email: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

Abstract

This study aims to describe and analyze efforts to reduce the risk of landslides by implementing a disaster-resilient village development program in the city of Sawahlunto. This research is motivated by the frequent occurrence of disasters such as floods, landslides, land fires, residential fires, mine blasts, and tornadoes. Under these conditions, efforts to reduce disaster risk, which is an effort to minimize disasters' impact, need to be done. One of the most critical efforts to reduce disaster risk is to increase community preparedness in facing disaster threats. This was implemented through the Resilient Disaster Village program. The findings and analysis of the data that the researchers presented according to the Donald Van Meter and Carl Van Horn policy implementation models The implementation of the Resilient Village Disaster Program Development in Sawahlunto City has been going well. However, it is still not evenly distributed in all implemented villages, and still, two villages are determined. In the Resilient Disaster Village Program Development implementation, two villages that have implemented the Resilient Disaster Village Program Development according to the Resilient Disaster Village Program Development's objectives have begun to be reached. The Lumindai village is in the Primary Resilient Disaster Village category, and until now, there has been no improvement, and the same was true of Silungkang Oso Village. This is due to several indicators, namely the Facilitator with a small number and understanding of the Resilient Disaster Village Program Development implementor is not yet in-depth towards the Development of the Resilient Disaster Village Program, resources, especially budget resources, are still inadequate implementor of the Resilient Disaster Village Development, and support from the community at each village government is different. The Development of the Resilient Village Program has been carried out but not yet optimally due to the lack of development in the village determined.

Keywords: Disaster, Village, Resilient, implementation

1. Pendahuluan

Menurut Adila (2018:4) Pengurangan risiko bencana konsep dan praktik mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana. Hal ini juga termasuk melalui pengurangan keterpaparan terhadap ancaman bahaya, pengurangan kerentanan penduduk dan harta benda, pengelolaan lahan dan lingkungan secara bijak, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap peristiwa yang merugikan. Kota Sawahlunto pada masa pemerintah Hindia Belanda dikenal sebagai kota tambang batu bara dan Kota Sawahlunto juga dikenal dengan *Kota Kualu* karena jika dilihat dari ketinggian berbentuk seperti *Kualu* dan pemukiman warganya berada di lereng perbukitan. Dengan bentang alam yang dimiliki Kota Sawahlunto menyebabkan kota ini rawan terhadap bencana.

Menurut Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto tahun 2015, di Kota Sawahlunto kejadian bencana yang sering terjadi yaitu banjir, tanah longsor, kebakaran lahan, kebakaran pemukiman, ledakan tambang dan puting beliung. Enam kejadian bencana yang cenderung terjadi di Kota Sawahlunto disebabkan kontur daerah yang berada di daerah bukit

barisan dan pemukiman penduduknya yang berada di lereng perbukitan, dari enam bencana yang terjadi, salah satu potensi bencana yang paling banyak atau rawan terjadi di Kota Sawahlunto adalah tanah longsor dan dapat dilihat pada tabel 1.1 jumlah kejadian bencana.

Dari tabel 1.1 di empat kecamatan yang ada di Sawahlunto, ke empat kecamatan tersebut banyak mengalami kejadian tanah longsor dengan jumlah kejadian sebanyak 130 kejadian tanah longsor. Selain Tanah Longsor masyarakat juga waspada akan terjadinya bencana tanah bergerak yang diakibatkan hujan yang terus menerus mengguyur Kota Sawahlunto. Pada November 2018 kejadian tanah bergerak di Sawahlunto mengakibatkan 16 rumah rusak dan jalan retak sepanjang 40 meter dan mengancam pemukiman warga yang berada di lereng perbukitan maka warga harus waspada akan terjadinya tanah bergerak. Dan untuk itu dengan adanya peristiwa tersebut masyarakat perlu mengawasi diri dan sadar bahwa berada di daerah rawan bencana, maka perlu perannya pemerintah memberikan edukasi yang lebih kepada masyarakat agar masyarakat mandiri dalam menghadapi bencana disekitarnya.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Bencana Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2015

No	Kecamatan	Banjir	Cuaca ekstrim	Kebakaran Lahan dan Hutan	Kebakaran Pemukiman	Tanah longsor	Ledakan tambang	Jumlah
1.	Barangin	1	18	36	13	48	-	116
2.	Silungkang	4	1	10	8	42	-	65
3.	Lembah Segar	2	12	13	12	20	-	59
4	Talawi	2	2	21	10	20	2	55
Jumlah		9	33	80	43	130	2	269

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto, 2015

Dalam kaitannya terhadap Desa Tangguh Bencana tersebut maka, BPBD Provinsi Sumatera Barat dan BPBD Kota Sawahlunto telah menetapkan Desa Lumindai Kecamatan Barangin dan Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang sebagai salah satu Desa Tangguh Bencana pada tahun 2016. Perka BNPB Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, menjelaskan bahwa tujuan khusus pengembangan Desa Tangguh Bencana adalah untuk (i) melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan, (ii) meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumberdaya dalam rangka mengurangi risiko bencana, (iii) meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi

pengurangan risiko bencana, (iv) meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumberdaya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, (v) meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lain yang peduli.

Perka BNPB Nomor 1 menjelaskan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana ialah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah desa/kelurahan dapat dikatakan tangguh terhadap bencana ketika sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di

wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Hal ini juga dapat dipahami dari apa yang dinyatakan Van Meter & Van Horn dalam Solichin (2002:65) implementasi kebijakan, yaitu

“ those actions by public or private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions “ (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola

operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu. Artinya proses implementasi mengarah pada proses kebijakan setelah sebuah kebijakan ditetapkan hingga mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Dengan adanya Perka BNPB nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/ Kelurahan Tangguh bencana sangat membantu upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor yang ada di Kota Sawahlunto, karena program ini adalah bentuk wujud dari Upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas atau Masyarakat atau disingkat UPRBBK namun dalam pelaksanaan Implementasi Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto terdapat beberapa kendala, dimulai dari sumber daya yang kurang mendukung pelaksanaan Desa Tangguh Bencana dan kesiapan implementor dalam menjalankan program ini.

Untuk itu penelitian ini peneliti kaji tentang Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor dalam Implementasi Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto. Kebijakan ini memiliki tujuan menciptakan desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan

menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana melalui kegiatan-kegiatan Pengembangan Desa Tangguh Bencana di tingkat Desa.

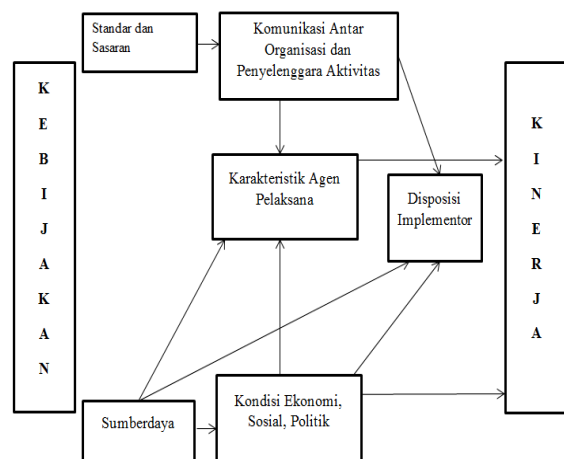
Dalam penelitian Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor melalui Implementasi Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Metter bersama Carl Van Horn (1975), atau yang lebih dikenal dengan Van Metter & Van Horn, alasan peneliti menggunakan teori ini diantaranya adalah Program Desa Tangguh Bencana merupakan sebuah kebijakan dengan pendekatan *Top-Down* yang bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan kebijakan atau program yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan atau program. Alasan lainnya adalah karena teori ini sesuai dengan fenomena dan masalah yang peneliti kaji, dimana penelitian ini mengkaji beberapa variabel dari teori ini, diantaranya melihat sumber daya yang digunakan, sasaran dan tujuan dari kebijakan atau program, dukungan sosial politik dan budaya, serta melihat sikap implementor dalam melaksanakan program Desa Tangguh Bencana

Selain itu menurut Van Metter & Van Horn Implementasi kebijakan tidak lah

hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal juga. Peneliti memilih teori ini karena peneliti merasa bisa melihat dan membedakan apa yang peneliti butuhkan dan peneliti cari dengan menggunakan variabel – variable dan indikator yang ada di dalam teori Van Metter & Van Horn ini.

Ada enam variabel Menurut Van Metter & Van Horn (1975:464) yang mempengaruhi kinerja kebijakan Publik, yaitu:

Gambar 1.1
Model Implementasi Kebijakan Van Metter Van Horn



Sumber: Dikutip dari buku Riant Nugroho, hal. 628

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah primer (wawancara) dan sekunder (dokumentasi). Teknis pemilihan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling berdasarkan pengetahuan mereka

tentang informasi yang diinginkan. Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur agar maksud serta tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Begitu juga halnya dengan standar dan sasaran dari kebijakan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana. Jika standar dan sasaran dari kebijakan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana tersebut tidak jelas maka akan menyebabkan multi interpretasi yang dapat menimbulkan konflik dan kesalahpahaman antar sesama implementor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana tersebut. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Hort untuk menilai standard dan sasaran suatu kebijakan jelas dan terukur, maka perlu dikaji dengan dua indikator berikut :

a. jelas dan terukur

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Isi kebijakan harus

mampu dimengerti dan dipahami oleh implementor. Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana sebagai program nasional seharusnya memiliki sasaran yang jelas dalam pelaksanaannya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Implementasi Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto sudah memiliki tujuan yang jelas yang dijelaskan dalam Perkan BNPB Nomor 1 Tahun 2012 yaitu untuk mewujudkan desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana seperti Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto, Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Barangin serta Desa Silungkang Oso dan Desa Lumindai sudah memahami tujuan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam mengukur keberhasilan dari Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana menggunakan kategori yang ada dalam Pedoman

Desa Tangguh Bencana. Dimana terdapat kategori Desa Tangguh Bencana yaitu pratama, madya dan utama. Dan untuk saat ini Desa Lumindai dan Silungkang Oso masih dalam kategori pratama

b. Keadilan

Indikator keadilan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn yaitu dimana suatu kebijakan mencakup berbagai keinginan dan aspirasi serta memberlakukan aturan yang sama bagi seluruh pihak yang terlibat. indikator keadilan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn ini, seluruh pihak terlibat telah menggunakan aturan dan pedoman yang sama dalam pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tagguh Bencana yaitu Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 serta Petunjuk Teknis Desa Tangguh Bencana. Dua desa di Kota Sawahlunto yang telah diberikan sosialisasi diharapkan dapat mengimplementasikan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana di desa masing-masing. Namun pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana di masing-masing desa masih tetap berjalan meskipun ada desa yang tidak dapat pendampingan.

Hal ini karena desa sudah memiliki pedoman dan diberikan sosialisasi mengenai Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana.

2. Sumber Daya

Implementasi sebuah kebijakan perlu dukungan sumber daya agar dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan daya yang tersedia. Dalam implementasi kebijakan dibutuhkan sumber daya sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn merupakan sumber daya penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Sumber daya manusia dapat berupa kompetensi dan kemampuan yang dimiliki implementor serta jumlah staff untuk implementasi kebijakan.

Dalam Pengimplementasian Program Pengembang Desa Tangguh Bencana Berbagai bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh implementor Desa tangguh bencana kota sawahlunto secara kuantitas sudah memadai sehingga seluruh kegiatan pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto dapat

berjalan dengan baik tanpa ada kendala kekurangan sumber daya manusia. Secara kualitas dan kemampuan, anggota pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dan kompeten dalam bidang bencana namun anggota fasilitator pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana perlu memahami lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana agar pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana berjalan dengan lebih baik.

Sementara desa sebagai penyelenggara Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana yang berhubungan langsung dengan masyarakat dapat dikatakan sudah memiliki jumlah sumber daya manusia yang memadai. Setiap desa memiliki Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB sehingga pihak desa dan masyarakat di desa bisa mendapatkan materi desa tangguh bencana secara optimal dikarenakan tidak semua masyarakat bisa mengikuti kegiatan. Selain itu desa juga bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga untuk membantu penyelenggaraan kegiatan

Pengembangan Desa Tangguh Bencana.

b. Sumber daya non manusia

Sumber Daya Non Manusia merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Donald van Meter dan Carl Van Horn, ketika sumber daya manusia baik telah tersedia namun sumber daya non manusia tidak memadai maka akan sulit untuk merealisasikan kebijakan. Sumber daya non manusia ini terdiri dari finansial, sarana prasarana, serta sumber daya waktu.

Dalam penyelenggaraan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana, implementor Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana Sawahlunto diberikan dana bantuan dari BPBD Provinsi, untuk tahap yang dinamakan tahap penumbuhan, dan untuk tahun selanjutnya diserahkan ke pemerintah kota dan tahun ketiga desa menggunakan dana desa untuk pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana. Dalam implementasi Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana, fasilitator Program Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana masih mengalami kekurangan anggaran pada

tahun kedua karena sudah di serah kan ke pemerintah kota sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan fasilitator Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto seperti pelaksanaan pendampingan. Karena keterbatasan anggaran, fasilitator Program Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana belum bisa memberikan pendampingan langsung kepada seluruh desa di Kota Sawahlunto. Fasilitator hanya bisa memberikan pendampingan kepada 2 desa yang ditetapkan sebagai desa tangguh bencana oleh Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto. Sementara untuk sarana-prasarana fisik, fasilitator Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto. Pemerintah desa juga menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang sudah dimiliki oleh desa untuk menyelenggarakan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana seperti ruang pertemuan, mesin sinso, gerobak, sepatu boot dan perkakas yang berguna ketika terjadi bencana.

Sumber daya berikutnya yaitu

sumber daya waktu. Sumber daya waktu merupakan waktu yang dimiliki dan digunakan dalam implementasi Program Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana. Sumber daya waktu dalam pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto masih mengalami keterbatasan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kegiatan lain yang dimiliki Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto serta banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Selain itu, kesibukan masyarakat dan berbagai kegiatan di desa juga menyebabkan waktu untuk melaksanakan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana ini terbatas. Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana tetap berjalan dengan baik namun masih belum optimal karena adanya keterbatasan waktu untuk melaksanakan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam variabel karakteristik agen pelaksana ini terdapat beberapa hal penting yaitu struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan dalam organisasi pelaksana kebijakan dengan uraian sebagai berikut

a. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh struktur birokrasi dari pihak yang mengimplementasikan kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan melemahkan pengawasan dan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Salah satu hal penting dalam struktur birokrasi yaitu ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan bagi implementor untuk melaksanakan kebijakan.

Implementor Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana memiliki struktur organisasi yang kompleks sehingga kurang mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena program ini dari pada tahap awal atau penumbuhan di kembangkan oleh provinsi dan dan tahun kedua baru diserahkan ke kabupaten/kota yang didaerah tersebut ada desa atau nagari tangguh bencana sehingga pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana tingkat dilaksanakan di tingkat Kota melalui BPBD Provinsi. Karena itu pelaksanaan Program Pengembangan Desa Tangguh

Bencana dapat dilaksanakan dengan baik tanpa struktur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit.

Selain itu, dalam mengimplementasikan Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana, implementor Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana tidak memiliki SOP khusus, Fasilitator mengikuti aturan- aturan yang telah diberikan BNPB. Masyarakat hanya dapat mengakses Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana dan membaca untuk mengetahui apa itu desa tangguh bencana dan apa kegiatan untuk mewujudkan desa tangguh bencana. Implementasi Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto sudah didukung oleh struktur birokrasi yang jelas dan tidak berbelit-belit.

b. Norma-Norma

Norma-norma yang dimaksud dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn meliputi nilai-nilai yang dibangun dalam organisasi serta aturan-aturan yang telah disepakati bersama dalam organisasi.

Norma- norma yang diterapkan dan berkembang dalam Fasilitator Pengembangan Program

Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto akan mempengaruhi disiplin dan kepatuhan dari anggota Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto.

Dalam penyelenggaraan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana, Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana memiliki komitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Fasilitator. Dokumen-dokumen kebijakan seperti petunjuk teknis, SK Kepala Badan, dan surat tugas merupakan instrumen yang membentuk norma dan kebiasaan dalam Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana. Hal ini menyebabkan anggota Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana memiliki komitmen dan kedisiplinan dalam mengimplementasikan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana. Sementara dalam melaksanakan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana di desa tangguh bencana.

c. Pola-Pola Hubungan dalam Organisasi

Pola-pola hubungan dalam

organisasi melihat bagaimana organisasi yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan. Pola hubungan dapat dilihat dari proses komunikasi dan informasi yang terjadi dalam agen pelaksana kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana pola hubungan dalam Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto.

Dalam pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana, pola-pola hubungan yang terjadi di dalam birokrasi dilakukan dalam bentuk rapat-rapat internal Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto serta kegiatan FGD dengan instansi lain untuk pengembangan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana. Sementara pola hubungan di desa dilakukan dalam bentuk hubungan vertikal dan horizontal sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya. Pola-pola hubungan dalam birokrasi pelaksana Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto sejauh ini berjalan dengan baik dan mendukung pelaksanaan Pengembangan Program Desa

Tangguh Bencana.

4. Sikap atau Kecenderungan (disposisi) Pelaksana

Disposisi implementor meliputi tiga hal penting yaitu:

a. Respons Implementor Terhadap Kebijakan

Respons yang diberikan oleh implementor terhadap suatu kebijakan akan mempengaruhi kemauan dari implementor dalam melaksanakan kebijakan. Respon implementor dapat dilihat dari kesungguhan implementor untuk melaksanakan kebijakan. Dalam pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto, respon baik dari Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto akan mempengaruhi bagaimana pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana

Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana Kota Sawahlunto mendukung pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana karena Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana memiliki pandangan bahwa peran masyarakat penting dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana. Untuk desa tangguh bencana di Kota Sawahlunto mendukung dan memiliki respon baik terhadap Program Desa Tangguh Bencana seperti melakukan pengembangan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana di desa. Namun dalam pelaksanaannya, tiap-tiap desa memiliki intensitas yang berbeda tergantung disposisi atau keinginan serta kemampuan desa untuk melaksanakan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana

b. Kognisi

Kognisi atau pemahaman implementor terhadap kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Jika implementor tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kebijakan, maka kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. Pemahaman dalam penelitian ini yaitu sejauh mana implementor memahami Program Pengembangan Desa Tangguh Bencana.

Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana dan implementor memiliki pemahaman mengenai tujuan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana. Namun, Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana dan

implementor belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana. Hal ini terlihat dari strategi dan program yang dilaksanakan dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana masih belum optimal. Sejauh ini, pihak-pihak yang terlibat memahami tujuan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana namun belum semua memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana.

5. Intensitas Disposisi Implementor

Menurut Van Meter dan Van Horn, intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor mengenai kebijakan. Berdasarkan berbagai penjabaran di atas, Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana memiliki keyakinan bahwa Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana ini bisa membantu meminimalisir dampak-dampak dari bencana terhadap masyarakat dengan adanya sinergi pemerintah dan masyarakat memiliki preferensi bahwa banyak manfaat yang dirasakan baik masyarakat dengan adanya Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana. Keyakinan dari

implementor ini akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

6. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi dan koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dukungan antar instansi yang terlibat. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi.

Pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana sudah berjalan namun masih belum optimal. Seperti komunikasi antara Fasilitator Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana dengan desa sudah berjalan namun belum secara intens. Komunikasi antara desa dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan didukung dengan perkembangan teknologi serta inovasi yaitu grup facebook. Sementara komunikasi dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana.

7. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang dimaksud dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Berikut uraian lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana

a. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial dalam implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn meliputi sifat opini publik yang ada di lingkungan kebijakan dan karakteristik partisipan di wilayah pelaksanaan kebijakan. Lingkungan sosial meliputi manusia dan kehidupan sosial yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Lingkungan sosial yang dimaksud dalam Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana adalah masyarakat yang berada di Desa Tangguh Bencana. Respon dan opini dari masyarakat yang berada di Desa Tangguh Bencanat erhadap Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana akan

mempengaruhi pelaksanaan program.

Secara umum, dukungan sosial dari masyarakat terhadap Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana sudah berjalan cukup baik meskipun masih ada beberapa masyarakat yang masih belum paham dan kurang peduli terhadap pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana. Selain itu, masih terdapat kendala kesibukan dan aktivitas keseharian masyarakat sehingga masyarakat sulit untuk terlibat. Dukungan masyarakat secara umum juga sudah baik namun dengan kadar yang berbeda di masing-masing Desa.

b. Lingkungan Ekonomi

Lingkungan ekonomi dalam implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn meliputi ketersediaan sumberdaya ekonomi di lingkungan pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat pengaruh kondisi ekonomi dalam implementasi Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana . Lingkungan ekonomi yang dimaksudkan disini yaitu kondisi ekonomi Kota Sawahlunto dan masyarakat yang berada di Desa Tangguh Bencana sebagai sasaran dari Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana.

8. Kinerja Implementasi Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn, proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Dilihat dari pencapaian implementasi kebijakan terhadap sasaran kebijakan, semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan kebijakan maka kebijakan dianggap semakin memiliki kinerja yang baik. Dalam penelitian mengenai Implementasi Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto ini, dapat dilihat kinerja kebijakan yang baik tercipta apabila tujuan utama dari Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana ini dapat tercapai. Tujuan utama Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana adalah meningkatkan kemampuan warga masyarakat desa agar warga menambah pengetahuan dan keterampilan teknis tertentu, dapat hidup aman dan nyaman berdampingan dengan dinamika alam yang ada di lingkungannya, serta peduli dan berpikir strategis untuk dapat melakukan

kegiatan penghidupan yang berkelanjutan

Kinerja Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana Tingkat di Kota Sawahlunto dapat diukur menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang saling berkaitan satu sama lain dan mempengaruhi pelaksanaan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana. Dalam Implementasi Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto sesuai dengan yang telah peneliti deskripsikan menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam bab ini, peneliti mengindikasikan Implementasi Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto sudah berjalan dengan baik namun masih belum optimal.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data yang peneliti paparkan menurut model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn implementasi Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana di Kota Sawahlunto sudah berjalan dengan baik, namun masih belum merata di semua desa dilaksanakan dan masih dua desa yang

ditetapkan. Dalam implementasi Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana, dua desa yang sudah melaksanakan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana sesuai tujuan Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana dan tujuan sudah mulai tercapai dan desa Lumindai berada di kategori Desa Tangguh Bencana Pratama dan sampai saat sekarang ini belum ada peningkatan dan hal sama juga di alami Desa Silungkang Oso. Hal ini disebabkan karena beberapa indikator yaitu Fasilitator dengan jumlah yang sedikit dan pemahaman dari implementor Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana masih belum mendalam terhadap Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana, sumberdaya khususnya sumberdaya anggaran yang masih belum memadai implementor Pengembangan Desa Tangguh Bencana, serta dukungan dari masyarakat di masing-masing pemerintah desa yang berbeda-beda. Pengembangan Program Desa Tangguh Bencana telah dilaksanakan namun belum secara optimal karena tidak adanya perkembangan di desa yang ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung. Alfabeta.
- Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal* Yogyakarta. Gava Media.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Edisi 3*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvona S. 2018. *The SAGE Handbook of Qualitative Research Fifth Edition*. CA: Sage Publications. Thousand Oaks.
- Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta. Gava Media.
- Keban, Yermias, T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik konsep, teori dan isu*. Yogyakarta. Gava Media
- Kodoatie RJ, Sjarief R. , 2010. *Tata Ruang Air, Pengelolaan Bencana, Pengelolaan Infrastruktur, Penataan Ruang Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta. ANDI.
- Miles, Matthew B. and Huberman, A. Michael. 1994. *Qualitative Data Analysis Second Edition*. United States of America: Sage Publications.
- Namawi, Ismail. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN, Surabaya, 2009.

- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurjanah, R. Sugiharto, Dede Kuswanda Siswanto BP, Adikoesoemo. 2012. *Manajemen Bencana*. Alfabeta. Bandung.
- Putera, Roni Ekha. 2018. *Mitigasi Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi*. Depok. PT Raja Grafindo Persada.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung. ALFABETA.
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Taufiqurrokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra dkk. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Sidoarjo. Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori & Proses*. Yogyakarta. Media Pressindo.
- Bevaola Kusumasari, Quamrul Alam and Kamal Siddiqui, 2010, Resource Capability For Local Government in Managing Disaster, Disaster Prevention and Management, Vol. 19 No.4, Australia, Departement of Management, Faculty of Business and Economics, Monash University.
- Munir, Miftakhul. 2017. Jurnal "Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh
- Rahma, Adila, Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Melalui Pendidikan Formal. Universitas Islam Nusantara